

Internal and External Criticism of the History of Leadership Hadith: A Case Study in the Book of Sahih Bukhari and Muslims

Affan Maulidi¹, Moh.Mujib²
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya^{1,2}
✉ Affanmaulidi@gmail.com

Abstract:

The hadith on leadership stating that political authority belongs to the Quraysh tribe constitutes one of the key narrations in classical Islamic political thought. This narration is recorded in *Sahih al-Bukhari* and *Sahih Muslim*, and has long been understood as a normative foundation for the theory of *imamah* as well as a justification for genealogical requirements of leadership within the discourse of *fiqh siyasah*. However, in the context of modern politics, characterized by the nation-state system, democracy, and the principle of equality, the interpretation of this hadith requires a more proportional methodological approach. This study aims to analyze the hadith of Quraysh leadership through the approaches of sanad (chain of transmission) and matan (textual) criticism. It is a library-based research employing a descriptive-analytical method, examining transmission chains, the credibility of narrators, textual structure, and the socio-historical context of the hadith's emergence. The findings indicate that the hadith is authentic in terms of sanad, yet context-dependent in terms of matan. The reference to Quraysh reflects the socio-political reality of early Islam rather than a universal normative rule. Therefore, the hadith is better understood as conveying leadership values, such as legitimacy, capacity, and responsibility, rather than prescribing rigid genealogical requirements, thus maintaining its relevance in contemporary political contexts.

Keywords: leadership hadith; sanad criticism; matan criticism; Islamic politics; contextualization of hadith.

Abstrak:

Hadis tentang kepemimpinan yang menyatakan bahwa otoritas politik berada pada suku Quraisy merupakan salah satu riwayat penting dalam tradisi politik Islam klasik. Riwayat ini tercantum dalam Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim sehingga dipahami sebagai dasar normatif dalam teori imamah serta legitimasi syarat genealogis kepemimpinan dalam fikih siyasah. Namun, dalam konteks politik modern yang ditandai oleh sistem negara-bangsa, demokrasi, dan prinsip kesetaraan, pemaknaan hadis tersebut memerlukan kajian metodologis lebih proporsional. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis hadis kepemimpinan Quraisy melalui pendekatan kritik sanad dan matan. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan metode deskriptif-analitis dengan menelaah jalur periwayatan, kredibilitas perawi, struktur teks, serta konteks sosial-historis kemunculan hadis. Hasil kajian menunjukkan bahwa hadis ini berstatus sahih secara sanad, namun secara matan bersifat kontekstual. Penyebutan Quraisy merefleksikan realitas sosial-politik awal Islam, bukan ketentuan normatif universal. Oleh karena itu, hadis ini lebih tepat dipahami sebagai pedoman nilai kepemimpinan daripada syarat genealogis kaku sehingga tetap relevan dalam dinamika politik modern.

Kata kunci: hadis kepemimpinan; kritik sanad; kritik matan; politik Islam; kontekstualisasi hadis.

ملخص البحث:

يعد الحديث المتعلق بالقيادة، والذي ينصّ على أن السلطة السياسية تكون في قريش، من الروايات المهمة في التراث السياسي الإسلامي الكلاسيكي. وقد ورد هذا الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم، ولذلك فهم عبر القرون بوصفه أساساً معيارياً في بناء نظرية الإمامة، كما استُخدم لتبرير اشتراط النسب القرشي في القيادة ضمن أدبيات الفقه السياسي. غير أن تفسير هذا الحديث في سياق السياسة الحديثة، التي تتسم بنظام الدولة-الأمة، والديمقراطية، ومبدأ المساواة بين المواطنين، يقتضي مقارنة منهجية أكثر توازناً. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل حديث قيادة قريش من خلال منهج نقد السند ونقد المتن. وتعتمد الدراسة على البحث المكتبي باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال فحص أسانيد الرواية، وتقييم وثيقة الرواية، وتحليل البنية النصية، والسياق الاجتماعي-التاريخي لورود الحديث. وتظهر النتائج أن الحديث صحيح من حيث السند، لكنه ذو دلالة سياقية من حيث المتن. إذ يعكس ذكر قريش الواقع الاجتماعي والسياسي في صدر الإسلام، ولا يدل على حكم معياري عام ومطلق. وبناء على ذلك، يُفهم الحديث على أنه توجيه نحو قيم القيادة، مثل الشرعية والكفاءة والمسؤولية، لا باعتباره شرطاً نسبياً صارماً، مما يجعله صالحاً للفهم في سياق النظم السياسية المعاصرة.

الكلمات الأساسية: حديث القيادة؛ نقد السند؛ نقد المتن؛ السياسة الإسلامية؛ سياقية الحديث

PENDAHULUAN

Hadis merupakan salah satu sumber utama dalam ajaran Islam yang memiliki peran penting dalam pembentukan hukum, teologi, serta konstruksi sosial-politik umat Islam. Selain berfungsi sebagai penjelas Al-Qur'an, hadis juga menjadi landasan normatif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam persoalan kepemimpinan.¹ Dalam khazanah klasik, sejumlah hadis yang diriwayatkan dalam *Sahih al-Bukhari* dan *Sahih Muslim* kerap dijadikan dasar legitimasi bahwa kepemimpinan umat Islam berada pada suku Quraisy, yang kemudian menjadi bagian penting dalam konstruksi teori *imamah* dalam tradisi politik Islam.²

Dalam literatur klasik, hadis kepemimpinan Quraisy umumnya dipahami secara normatif sebagai ketentuan yang mengikat, khususnya dalam konteks sistem kekhalifahan. Para ulama menjadikannya sebagai legitimasi teologis atas syarat genealogis kepemimpinan, yang berangkat dari realitas sosial-politik masyarakat Arab awal yang masih berbasis kesukuan. Namun demikian,

¹ Asrul Ikral Syam et al., "Al-Quran dan Hadits Sumber Hukum dan Pedoman Hidup Umat Muslim," *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 5, no. 1 (2026): 460–73.

² Ozi Setiadi, "Kepemimpinan Bani Quraisy," *Jurnal Al-Ashriyyah* 4, no. 1 (2018): 80–99.

pendekatan normatif tersebut sering kali tidak disertai dengan analisis kritis terhadap aspek historis dan sosial yang melatarbelakangi kemunculan hadis, sehingga berpotensi melahirkan pemahaman yang cenderung tekstualistik.³

Seiring dengan perkembangan studi hadis modern, pendekatan terhadap hadis tidak lagi terbatas pada penerimaan otoritatif, tetapi juga melibatkan analisis kritis melalui dua pendekatan utama, yaitu kritik sanad (eksternal) dan kritik matan (internal). Kritik sanad berfokus pada validitas jalur periwayatan dan kredibilitas perawi, sedangkan kritik matan menekankan analisis terhadap substansi teks, baik dari aspek kebahasaan, rasionalitas, maupun konteks sosial-historisnya. Kedua pendekatan ini bersifat saling melengkapi dalam menentukan validitas sekaligus konstruksi makna hadis secara lebih komprehensif.⁴

Dalam konteks ini, hadis kepemimpinan Quraisy menjadi menarik untuk dikaji karena, di satu sisi, memiliki legitimasi kuat dalam tradisi hadis Sunni, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan problematika ketika dipahami secara literal dalam konteks politik modern yang menekankan prinsip kesetaraan, partisipasi, dan meritokrasi (berbasis kemampuan dan kompetensi). Perubahan struktur sosial dari masyarakat berbasis kesukuan menuju sistem negara-bangsa yang lebih kompleks menuntut adanya pembacaan ulang terhadap hadis tersebut secara lebih proporsional dan kontekstual.⁵

Meskipun berbagai kajian tentang hadis kepemimpinan Quraisy telah dilakukan melalui pendekatan normatif, kritis, maupun sosio-historis, sebagian besar masih bersifat parsial dan belum mengintegrasikan secara utuh antara analisis sanad dan matan.⁶ Selain itu, relasi antara kesahihan riwayat dan konstruksi makna hadis juga belum banyak dikaji secara mendalam dalam kerangka yang sistematis.⁷ Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu menggabungkan kedua pendekatan tersebut dalam satu kerangka analisis yang integratif.

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji hadis kepemimpinan Quraisy dalam riwayat *Sahih al-Bukhari* dan *Sahih Muslim* melalui pendekatan kritik eksternal dan internal. Fokus kajian diarahkan pada analisis kualitas sanad serta penelaahan makna matan dalam konteks sosial-politik kemunculannya dengan konteks politik modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara kesahihan riwayat dan konstruksi makna hadis secara integratif, sekaligus membuka ruang dialog antara tradisi klasik dan realitas politik modern.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian mengenai hadis kepemimpinan dari Bani Quraisy telah dilakukan dengan berbagai pendekatan, yang secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kecenderungan utama, normatif-tekstual, kritis, dan kontekstual-sosiohistoris.

Pendekatan normatif-tekstual, seperti yang dikemukakan oleh Ozi Setiadi, menunjukkan bahwa hadis kepemimpinan Quraisy diterima luas oleh ulama klasik sebagai dasar legitimasi

³ Wildan Fatoni Yusuf dan Hilmi Husaini Zuhri, "Telaah Hadis Kepemimpinan Quraisy Melalui Pendekatan Sosio-Historis," *Al-Shamela: Journal of Quranic and Hadith Studies* 1, no. 2 (2023): 197–213.

⁴ Rahmah Nur R, Mirna Yunita, dan Muhammad Ali, "Metode Kritik Sanad dan Matan Hadis," *Ma'had Aly: Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (2025): 111–21.

⁵ Imam Mustofa, "Memahami Hadits Kepemimpinan Dari Bangsa Quraisy dan Relevansinya Dengan Konsep Kepemimpinan Kontemporer," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits* 14, no. 2 (2020): 271–92.

⁶ Setiadi, "Kepemimpinan Bani Quraisy."

⁷ Yusuf dan Zuhri, "Telaah Hadis Kepemimpinan Quraisy Melalui Pendekatan Sosio-Historis."

politik. Dalam kajian tersebut, tokoh seperti Al-Mawardi dan Ibn Taymiyyah menjadikan nasab Quraisy sebagai salah satu syarat kepemimpinan, meskipun pendekatan ini cenderung tekstual dan kurang mempertimbangkan konteks historis hadis.⁸

Pendekatan kritis, sebagaimana ditunjukkan oleh Canra Krisna Jaya, menekankan pentingnya verifikasi hadis melalui analisis sanad dan matan. Pendekatan ini melihat bahwa hadis harus diuji secara metodologis dan menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak berbasis keturunan, melainkan pada kompetensi dan kualitas individu.⁹

Sementara itu, pendekatan kontekstual yang dikembangkan oleh Imam Mustofa menekankan bahwa pemahaman hadis tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial-politik modern. Nilai-nilai seperti keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan dinilai lebih relevan daripada aspek genealogis.¹⁰ Hal ini diperkuat oleh pendekatan sosio-historis dari Wildan Fatoni Yusuf dan Hilmi Husaini Zuhri yang melihat hadis tersebut sebagai refleksi dominasi Quraisy pada masa awal Islam, sehingga bersifat kontekstual, bukan universal.¹¹

Di sisi lain, dalam studi kepemimpinan modern, M. Joleen Watson menunjukkan bahwa tidak ada teori kepemimpinan yang bersifat universal. Kepemimpinan dipahami sebagai konstruksi dinamis yang bergeser dari model *leader-centered* (berpusat pada pemimpin) ke *follower-centered* (berorientasi pada pengikut) dengan penekanan pada partisipasi dan konteks sosial.¹²

Meskipun berbagai kajian tersebut memberikan kontribusi penting, masih terdapat celah penelitian karena sebagian besar bersifat parsial baik hanya menekankan aspek normatif, kritik sanad, maupun kontekstualisasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif yang menggabungkan kritik eksternal (sanad) dan internal (matan) untuk memahami hubungan antara kesahihan riwayat dan konstruksi makna secara lebih komprehensif. Kajian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan analisis yang lebih utuh dan relevan dengan konteks sosial-politik modern.

METODOLOGI PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hadis-hadis tentang kepemimpinan Quraisy yang terdapat dalam *Sahih al-Bukhari* dan *Sahih Muslim*, sedangkan data sekunder berasal dari literatur pendukung berupa kitab hadis, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan topik kajian.

Pendekatan yang digunakan adalah kritik hadis yang meliputi kritik eksternal (sanad) dan kritik internal (matan). Kritik eksternal difokuskan pada analisis jalur periwayatan dan kredibilitas perawi, sementara kritik internal diarahkan pada penelaahan struktur teks, aspek kebahasaan, serta konteks sosial-historis kemunculan hadis.¹³

⁸ Setiadi, "Kepemimpinan Bani Quraisy."

⁹ Canra Krisna Jaya, "Kritik Terhadap Pemahaman yang Menyatakan Bahwa Kepemimpinan Islam Harus Berasal dari Bani Quraisy," *Jurnal Al-Ashriyyah* 4, no. 2 (2018): 23–37.

¹⁰ Mustofa, "Memahami Hadits Kepemimpinan Dari Bangsa Quraisy dan Relevansinya Dengan Konsep Kepemimpinan Kontemporer."

¹¹ Yusuf dan Zuhri, "Telaah Hadis Kepemimpinan Quraisy Melalui Pendekatan Sosio-Historis."

¹² M Joleen Watson, "Beyond Transformational Leadership : A Descriptive Review on the Future of Leadership Theory in Human Resource Development," *Open Acces Library Journal* 11 (2024): 1–14, <https://doi.org/10.4236/oalib.1111362>.

¹³ Nur R, Yunita, dan Ali, "Metode Kritik Sanad dan Matan Hadis."

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan data secara terstruktur dan kemudian menganalisisnya untuk memahami hubungan antara kesahihan sanad dan konstruksi makna matan hadis secara integratif.¹⁴

PEMBAHASAN

Deskripsi Hadits Kepemimpinan Quraisy

Hadis kepemimpinan Quraisy merupakan salah satu riwayat penting dalam diskursus politik Islam yang sering dijadikan dasar normatif dalam pembahasan otoritas kepemimpinan. Hadis ini diriwayatkan dalam berbagai redaksi dalam *Sahih al-Bukhari* dan *Sahih Muslim*, yang menunjukkan adanya variasi lafaz namun memiliki substansi makna yang serupa, yaitu penegasan posisi Quraisy dalam kepemimpinan umat Islam.¹⁵

Dalam konteks ini, hadis kepemimpinan Quraisy diriwayatkan dalam beberapa redaksi dalam *Sahih al-Bukhari* dan *Sahih Muslim*. Kedua kitab tersebut memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam tradisi hadis Sunni, sehingga riwayat yang terdapat di dalamnya memiliki tingkat otoritas yang kuat.¹⁶ Adapun beberapa riwayat tersebut sebagai berikut:

Dalam *Sahih al-Bukhari* diriwayatkan:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَبَّكَوْنَ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ فَعَضِبَ فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا تُؤْتَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُولَئِكَ جُهَالِكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يَعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَبَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ" تَابَعَهُ نَعِيمٌ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri mengatakan, Muhammad bin Jubair menceritakan, Mu'awiyah mendapat informasi ketika itu Jubair berada disampingnya saat berada dalam rombongan Quraisy, bahwa Abdullah bin Amr menceritakan, bahwa akan ada raja dari kabilah Qahthan. Spontan Mu'awiyah murka, ia berdiri dan memanjatkan puji-pujian kepada Allah dengan pujian semestinya, kemudian mengatakan; *'Amma ba'd*. Telah sampai berita kepadaku bahwa beberapa orang diantara kalian menceritakan hadist yang tidak terdapat dalam kitabullah dan tidak pula berasal dari Rasulullah SAW, mereka itu adalah orang-orang jahil kalian, jauhilah olehmu angan-angan yang menyesatkan pemiliknya, sebab aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Kepemimpinan ini tetap berada di Quraisy, tidaklah seseorang memusuhi mereka, selain Allah menelungkupkannya dalam neraka diatas wajahnya, selama mereka menegakkan agama." hadist ini dikuatkan oleh Nu'aim dari Ibnul Mubarak dari Ma'mar dari Az Zuhri dari Muhammad Ibnu Jubair.¹⁷

¹⁴ Sofwatillah, M. Syahrani Jailani, dan Deassy Arestya Saksitha, "Teknik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah," *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 79–91.

¹⁵ Mustofa, "Memahami Hadits Kepemimpinan Dari Bangsa Quraisy dan Relevansinya Dengan Konsep Kepemimpinan Kontemporer."

¹⁶ Mochamad Samsukadi, "Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim (Analisis Metodologis Kitab Hadis Otoritatif Hukum Islam)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 1–16.

¹⁷ Muhammad ibn Ismail Al-Bukhori, *Shohih Bukhori* (Beirut: Dar Tawq al-Najah, 2001).

Sementara itu, dalam Sahih Muslim diriwayatkan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "النَّاسُ تَبِعَ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبِعَ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبِعَ لِكَافِرِهِمْ".¹⁸

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dia berkata: ini seperti yang pernah diceritakan oleh Abu Hurairah kepada kami dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, kemudian dia menyebutkan beberapa hadits yang di antaranya adalah, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Manusia itu mengikuti Quraisy dalam permasalahan ini (kepemimpinan), Muslim mereka mengikuti Muslim (Quraisy), dan kafir mereka mengikuti kafir mereka (Quraisy)".¹⁸

Variasi redaksi tersebut menunjukkan bahwa hadis kepemimpinan Quraisy tidak hadir dalam satu bentuk tunggal, melainkan dalam beberapa bentuk periwayatan yang berbeda.¹⁹ Meskipun demikian, keseluruhan riwayat tersebut memiliki titik temu pada penegasan bahwa Quraisy memiliki posisi sentral dalam urusan kepemimpinan umat Islam.

Dari sisi periwayatan, hadis ini diriwayatkan oleh sejumlah sahabat, seperti Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Hurairah, melalui jalur sanad yang beragam. Keberadaan hadis ini dalam dua kitab hadis paling otoritatif dalam tradisi Sunni memperkuat posisinya sebagai riwayat yang memiliki tingkat penerimaan tinggi di kalangan ulama.²⁰

Meskipun demikian, perbedaan redaksi dalam berbagai riwayat membuka ruang bagi analisis lebih lanjut, khususnya dalam memahami makna istilah-istilah kunci seperti *al-amr* (kepemimpinan) dan *Quraisy*. Variasi ini juga mengindikasikan kemungkinan adanya perbedaan konteks periwayatan yang dapat memengaruhi konstruksi makna hadis. Oleh karena itu, deskripsi terhadap keseluruhan riwayat menjadi langkah awal yang penting sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, baik dari aspek sanad maupun matan.

Kritik Eksternal (Sanad dan Perawi Hadits)

Kritik eksternal atau kritik sanad merupakan langkah penting dalam menilai tingkat keotentikan suatu hadis melalui analisis kesinambungan jalur periwayatan (*ittishal al-sanad*) serta kredibilitas para perawi.²¹ Dalam konteks hadis kepemimpinan Quraisy, riwayat yang terdapat dalam *Sahih al-Bukhari* dan *Sahih Muslim* menunjukkan adanya jalur periwayatan yang beragam namun tetap terhubung secara sanad.

Pada riwayat *Sahih al-Bukhari*, hadis ini diriwayatkan melalui jalur Abu al-Yaman, dari Syu'aib, dari al-Zuhri, dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari Mu'awiyah. Jalur ini menunjukkan kesinambungan periwayatan tanpa adanya perawi yang terputus.²² Selain itu, tokoh

¹⁸ Muslim ibn Al-Hajaj, *Shohih Al-Muslim* (Beirut: Dar Ihya' Al-Turats Al-'Arabi, 2003).

¹⁹ Mustofa, "Memahami Hadits Kepemimpinan Dari Bangsa Quraisy dan Relevansinya Dengan Konsep Kepemimpinan Kontemporer."

²⁰ Samsukadi, "Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim (Analisis Metodologis Kitab Hadis Otoritatif Hukum Islam)."

²¹ Misrawati, Muh Tasbih, dan Zanab Abdullah, "Kajian Metodologi Kritik Sanad dalam Tradisi Ilmu Hadis," *Al-Iftah: Jurnal Tafsir Al-Qur'an dan Hadist* 2, no. 1 (2026): 1–10.

²² Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqolani, *Fathu Al-Bari* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1960).

seperti al-Zuhri dikenal sebagai perawi terpercaya dari kalangan tabi'in yang memiliki kontribusi besar dalam transmisi hadis.²³

Sementara itu, dalam riwayat *Sahih Muslim*, hadis ini diriwayatkan melalui jalur Muhammad bin Rafi', dari 'Abd al-Razzaq, dari Ma'mar, dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah. Jalur ini juga menunjukkan kesinambungan sanad yang kuat serta melibatkan perawi-perawi yang memiliki reputasi kredibel dalam tradisi keilmuan hadis.²⁴

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa hadis kepemimpinan Quraisy memiliki sanad yang memenuhi kriteria hadis sahih, baik dari aspek kesinambungan periwayatan maupun kredibilitas perawi. Namun demikian, dalam kerangka kajian hadis kontemporer, kesahihan sanad tidak serta-merta menentukan pemahaman makna hadis secara final. Oleh karena itu, diperlukan analisis lanjutan terhadap matan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Kritik Internal (Matan Hadits)

Setelah analisis sanad menunjukkan bahwa hadis kepemimpinan Quraisy memiliki tingkat keotentikan yang tinggi, langkah selanjutnya adalah melakukan kritik internal (*naqd al-matn*) untuk memahami kandungan maknanya secara komprehensif. Kritik matan menjadi penting karena kesahihan sanad tidak selalu berbanding lurus dengan pemahaman tekstual hadis, sehingga diperlukan analisis terhadap aspek kebahasaan, konteks historis, dan kemungkinan interpretasi yang beragam.²⁵

Secara tekstual, hadis ini memuat beberapa istilah kunci, terutama *al-amr* dan *Quraisy*. Istilah *al-amr* umumnya dipahami sebagai urusan atau otoritas kepemimpinan, yang dalam tradisi politik Islam klasik sering dikaitkan dengan konsep kekhalifahan. Sementara itu, *Quraisy* merujuk pada suku yang secara historis memiliki dominasi sosial dan politik di Jazirah Arab. Oleh karena itu, penyebutan Quraisy dalam hadis tidak hanya menunjukkan identitas genealogis, tetapi juga mencerminkan otoritas sosial yang diakui pada masa itu.²⁶

Dalam perspektif ulama klasik, hadis ini cenderung dipahami secara normatif sebagai ketentuan yang mensyaratkan kepemimpinan berasal dari Quraisy. Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa Quraisy memiliki legitimasi historis dan kapasitas politik yang unggul dalam memimpin umat²⁷. Namun, pendekatan ini sering kali bersifat tekstual dan kurang mempertimbangkan konteks sosial-historis kemunculan hadis.

Sebaliknya, dalam kajian kontemporer, hadis ini lebih banyak dipahami secara kontekstual. Penyebutan Quraisy dipandang sebagai refleksi dari realitas sosial-politik pada masa awal Islam, di

²³ Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqolani, *Tahdzib Al-Tahdzib* (Hyderabad: Darul Madba'ah Dairat al- Ma'arif al-Nidhomiyah, 1996).

²⁴ Al-'Iraqi Zainuddin Abdur Rohim bin Al -Husain bin Abdur Rohman bin Abu Bakar bin Ibrahim, *Tarhu At-Tatsrib 'Ala Syarh Al-Taqrif* (Kairo: Dar Al-Fikri al-Arobi, 1985).

²⁵ Engkus Kusnandar, "Studi Kritik Matan Hadis (Naqd Al-Matn): Kajian Sejarah dan Metodologi," *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 2, no. 1 (2020): 1–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.24235/jshn.v2i1.6765>.

²⁶ Mustofa, "Memahami Hadits Kepemimpinan Dari Bangsa Quraisy dan Relevansinya Dengan Konsep Kepemimpinan Kontemporer."

²⁷ Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Bashori al-Baghdadi masyhur bi Al-Mawardi, *Ahkamu al-sulthoniyah* (Kairo: Dar Al-Hadits, 1995).

mana mereka memiliki dominasi dan penerimaan luas dalam masyarakat.²⁸ Dengan demikian, hadis ini tidak dimaksudkan sebagai ketentuan normatif yang bersifat mutlak, melainkan sebagai deskripsi kontekstual terhadap kondisi saat itu.

Selain itu, variasi redaksi hadis yang memuat frasa *ma aqamu al-din* (selama mereka menegakkan agama), menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan tidak semata-mata didasarkan pada faktor keturunan, tetapi juga pada komitmen terhadap nilai-nilai agama.²⁹ Hal ini mengindikasikan bahwa hadis tersebut mengandung legitimasi bersyarat, bukan legitimasi absolut.

Dengan demikian, terdapat dua pendekatan utama dalam memahami hadis ini, yaitu normatif dan kontekstual. Dalam konteks kajian ini, pendekatan kontekstual lebih relevan karena mampu menjelaskan hadis secara lebih fleksibel serta selaras dengan perkembangan konsep kepemimpinan modern. Oleh karena itu, hadis kepemimpinan Quraisy dapat dipahami sebagai representasi nilai-nilai kepemimpinan, seperti legitimasi sosial, kapasitas, dan tanggung jawab, bukan sebagai ketentuan genealogis yang bersifat kaku.

Kontekstualisasi Hadits dalam Politik Modern

Kontekstualisasi hadis kepemimpinan Quraisy menjadi penting dalam rangka memahami relevansinya dalam sistem politik modern. Perubahan struktur sosial dari masyarakat Arab klasik yang berbasis kesukuan menuju masyarakat modern yang berbasis negara-bangsa membawa implikasi signifikan terhadap konsep kepemimpinan. Dalam sistem modern, legitimasi kepemimpinan tidak lagi ditentukan oleh garis keturunan, melainkan oleh mekanisme institusional seperti konstitusi, partisipasi politik, dan prinsip kesetaraan warga negara.³⁰

Dalam kerangka ini, pemahaman literal terhadap hadis kepemimpinan Quraisy sebagai ketentuan genealogis menjadi kurang relevan. Namun, apabila dipahami secara substansial, hadis ini tetap memiliki nilai penting sebagai pedoman etis dalam kepemimpinan. Quraisy dapat dimaknai sebagai simbol kelompok yang memiliki legitimasi sosial, kapasitas, dan penerimaan masyarakat, sehingga penekanannya bergeser dari identitas kesukuan menuju kualitas kepemimpinan.³¹

Lebih lanjut, dalam sistem politik modern yang pluralistik, kepemimpinan dituntut untuk bersifat inklusif dan mampu mengelola keberagaman secara adil. Hal ini sejalan dengan pendekatan kepemimpinan kontemporer yang menekankan aspek partisipasi, tanggung jawab publik, dan orientasi pada kesejahteraan masyarakat.³² Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam hadis, seperti keadilan, amanah, dan komitmen terhadap kebaikan bersama, tetap relevan untuk diaktualisasikan.

Selain itu, prinsip demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan semakin menegaskan bahwa kepemimpinan tidak bersifat eksklusif, tetapi terbuka bagi siapa saja

²⁸ Mustofa, "Memahami Hadits Kepemimpinan Dari Bangsa Quraisy dan Relevansinya Dengan Konsep Kepemimpinan Kontemporer."

²⁹ Jaya, "Kritik Terhadap Pemahaman yang Menyatakan Bahwa Kepemimpinan Islam Harus Berasal dari Bani Quraisy."

³⁰ Yusuf dan Zuhri, "Telaah Hadis Kepemimpinan Quraisy Melalui Pendekatan Sosio-Historis."

³¹ Setiadi, "Kepemimpinan Bani Quraisy."

³² Watson, "Beyond Transformational Leadership : A Descriptive Review on the Future of Leadership Theory in Human Resource Development."

yang memiliki kapasitas dan integritas.³³ Dalam konteks ini, reinterpretasi terhadap hadis kepemimpinan Quraisy menjadi penting untuk menghindari pemahaman yang eksklusif dan berpotensi diskriminatif.

Dengan demikian, hadis kepemimpinan Quraisy lebih tepat dipahami sebagai pedoman nilai yang bersifat universal daripada sebagai aturan formal yang kaku. Pendekatan ini memungkinkan hadis tetap relevan dalam dinamika politik modern, sekaligus menjaga substansi ajaran Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab dalam kepemimpinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa hadis kepemimpinan Quraisy yang diriwayatkan dalam Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim memiliki tingkat keotentikan yang tinggi dari aspek sanad, sehingga dapat dikategorikan sebagai hadis sahih dan dapat diterima dalam tradisi keilmuan Islam. Namun demikian, dari aspek matan, hadis ini tidak dapat dipahami secara tekstual semata, karena mengandung dimensi historis dan kontekstual yang kuat.

Dalam perspektif ulama klasik, hadis ini dipahami secara normatif dengan menjadikan keturuna Quraisy sebagai syarat kepemimpinan, yang dilatarbelakangi oleh kondisi sosial-politik masyarakat Arab pada masa itu. Sementara itu, dalam perspektif kontemporer, hadis ini lebih tepat dipahami secara kontekstual sebagai refleksi realitas historis, bukan sebagai ketentuan yang bersifat mutlak. Oleh karena itu, dalam konteks politik modern, hadis ini lebih relevan dipahami sebagai pedoman nilai kepemimpinan, seperti keadilan, amanah, kapasitas, dan legitimasi sosial, daripada sebagai aturan genealogis yang kaku.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman kontekstual terhadap hadis kepemimpinan Quraisy memungkinkan ajaran hadis tetap relevan dalam dinamika masyarakat modern, tanpa kehilangan nilai-nilai substansial yang dikandungnya. Sejalan dengan itu, penelitian ini merekomendasikan agar kajian hadis, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu sosial-politik, tidak hanya berhenti pada analisis tekstual, tetapi juga dikembangkan melalui pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan dinamika zaman. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian dengan mengkaji hadis-hadis politik lainnya secara komparatif, serta mengaitkannya dengan praktik kepemimpinan dalam berbagai sistem politik kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqolani, Ahmad ibn Ali ibn Hajar. *Fathu Al-Bari*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1960.
- — —. *Tahdzib Al-Tahdzib*. Hyderabad: Darul Madba'ah Dairat al- Ma'arif al-Nidhomiyah, 1996.
- Al-Bukhori, Muhammad ibn Ismail. *Shohih Bukhori*. Beirut: Dar Tawq al-Najah, 2001.
- Al-Hajaj, Muslim ibn. *Shohih Al-Muslim*. Beirut: Dar Ihya' Al-Turats Al-'Arabi, 2003.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Bashori al-Baghdadi masyhur bi. *Ahkamu al-sulthoniyah*. Kairo: Dar Al-Hadits, 1995.
- Alamsyah, Razaq Hammam, dan Zainal Arif. "Konsep Kekuasaan Dan Demokrasi Dalam Politik Islam Kontemporer (Studi Komparatif Pemikiran Qardhawi Dan Ali Abd Raziq)." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 15, no. 1 (2026): 145–61.
- Ibrahim, Al-'Iraqi Zainuddin Abdur Rohim bin Al -Husain bin Abdur Rohman bin Abu Bakar bin.

³³ Razaq Hammam Alamsyah dan Zainal Arif, "Konsep Kekuasaan Dan Demokrasi Dalam Politik Islam Kontemporer (Studi Komparatif Pemikiran Qardhawi Dan Ali Abd Raziq)," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 15, no. 1 (2026): 145–61.

- Tarhu At-Tatsrib 'Ala Syarh Al-Taqrīb*. Kairo: Dar Al-Fikri al-Arobi, 1985.
- Jaya, Canra Krisna. "Kritik Terhadap Pemahaman yang Menyatakan Bahwa Kepemimpinan Islam Harus Berasal dari Bani Quraisy." *Jurnal Al-Ashriyyah* 4, no. 2 (2018): 23–37.
- Kusnandar, Engkus. "Studi Kritik Matan Hadis (Naqd Al-Matn): Kajian Sejarah dan Metodologi." *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 2, no. 1 (2020): 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.24235/jshn.v2i1.6765>.
- Misrawati, Muh Tasbih, dan Zanab Abdullah. "Kajian Metodologi Kritik Sanad dalam Tradisi Ilmu Hadis." *Al-Iftah: Jurnal Tafsir Al-Qur'an dan Hadist* 2, no. 1 (2026): 1–10.
- Mustofa, Imam. "Memahami Hadits Kepemimpinan Dari Bangsa Quraisy dan Relevansinya Dengan Konsep Kepemimpinan Kontemporer." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits* 14, no. 2 (2020): 271–92.
- Nur R, Rahmah, Mirna Yunita, dan Muhammad Ali. "Metode Kritik Sanad dan Matan Hadis." *Ma'had Aly: Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (2025): 111–21.
- Samsukadi, Mochamad. "Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim (Analisis Metodologis Kitab Hadis Otoritatif Hukum Islam)." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 1–16.
- Setiadi, Ozi. "Kepemimpinan Bani Quraisy." *Jurnal Al-Ashriyyah* 4, no. 1 (2018): 80–99.
- Sofwatillah, M. Syahrani Jailani, dan Deassy Arestya Saksitha. "Teknik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah." *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 79–91.
- Syam, Asrul Ikral, Fatin Iftikhar, Ayla Fathiyah, Dwi Putri Cahyawati, dan Andriyani. "Al-Quran dan Hadits Sumber Hukum dan Pedoman Hidup Umat Muslim." *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 5, no. 1 (2026): 460–73.
- Watson, M Joleen. "Beyond Transformational Leadership : A Descriptive Review on the Future of Leadership Theory in Human Resource Development." *Open Accses Library Journal* 11 (2024): 1–14. <https://doi.org/10.4236/oalib.1111362>.
- Yusuf, Wildan Fatoni, dan Hilmi Husaini Zuhri. "Telaah Hadis Kepemimpinan Quraisy Melalui Pendekatan Sosio-Historis." *Al-Shamela: Journal of Quranic and Hadith Studies* 1, no. 2 (2023): 197–213.